

ABSTRAK

Penelitian ini akan membahas dan menganalisis peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam pengawasan Peraturan Daerah tentang pajak dan Retribusi Daerah. Peran Gubernur dalam pengawasan berubah seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : 1). Bagaimanakah mekanisme pengawasan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat?; dan 2). Bagaimanakah Penguatan Peran Gubernur dalam pengawasan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah?

Metode penelitian menggunakan yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai dengan menganalisa terhadap ketentuan yang terkandung didalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mekanisme yang dilakukan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat adalah pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lebih mengedepankan aspek evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebelum mendapat pengesahan. Diperlukannya penguatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui Tidak diberikannya Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan perlu adanya Uji Materi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di lembaga peradilan.

Kata Kunci: Gubernur; Wakil Pemerintah Pusat; Pengawasan Peraturan Daerah; Pajak Daerah; Retribusi Daerah

ABSTRACT

This study will discuss and analyze the role of the Governor as the Representative of the Central Government in the supervision of Regional Regulations on Regional Taxes and Retribution. The governor's role in oversight changes with the enactment of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. The formulation of the problems in this study are: 1). What is the mechanism for monitoring local regulations on regional taxes and levies by the Governor as the Representative of the Central Government ?; and 2). How to Strengthen the Role of the Governor in the supervision of regional regulations on regional taxes and levies?

The research method uses juridical normative, which is a research that deductively begins by analyzing the provisions contained in the articles of statutory regulations relating to the subject matter of this research. The results show that the mechanism carried out by the Governor as the Representative of the Central Government is the supervision of Regency Regional Regulations concerning Regional Taxes and Regional Retributions according to Law Number 23 of 2014 which prioritizes the evaluation aspects of the draft District / City Regional Regulations concerning Regional Taxes and Regional Levies before obtaining approval. It is necessary to strengthen the role of the Governor as the Representative of the Central Government in the supervision of Regency / City Regional Regulations concerning Regional Taxes and Regional Charges through the absence of a Regency / City Regional Regulation Register Number and it is necessary to have a Material Review of Regency / City Regional Regulations concerning Regional Taxes and Regional Charges in institutions Justice.

Keywords: Governor; Central Government Representatives; Supervision of Regional Regulations; Local tax; Regional Retribution